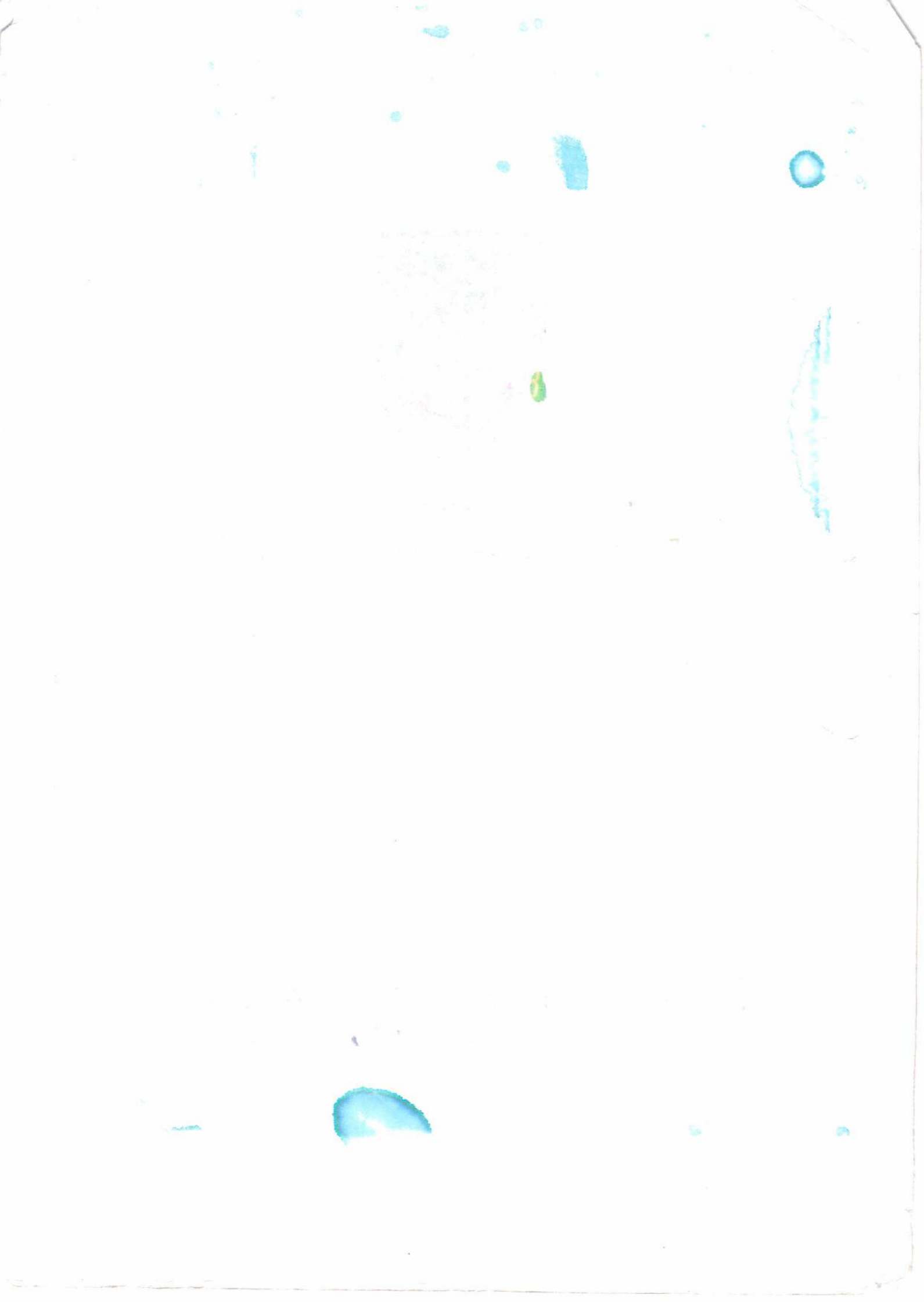




**RENCANA KERJA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KOTA BATAM
TAHUN 2019**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM
TAHUN 2018**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2019 telah selesai disusun.

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dibuat merupakan amanah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang diharuskan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Kerja secara sistematis terarah, terpadu yang berpedoman pada RPJMD Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam merupakan penjabaran dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dan RPJMD Kota Batam sesuai dengan tupoksi yang merupakan sebuah rangkaian kewenangan yang disusun dalam Rencana Kerja Tahunan.

Rancangan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2019 ini sangat penting bagi Pemerintah Kota Batam yang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan Program Kegiatan, maka proses penyusunan dilakukan secara sistematis yang disertai dengan kerangka pendanaan, maka proses penyusunan dilakukan secara sistematis yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif artinya bahwa informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam Dokumen Renstra yang merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat fleksibel.

Akhirnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pembuatan penyusunan Rancangan Rencana Kerja ini. Semoga Allah selalu membimbing dan memberikan kekuatan kepada kita semua untuk terus berkarya lebih baik sehingga Visi Satuan Polisi Pamong Praja dapat tercapai, yang pada akhirnya Visi Kota Batam dapat terwujud.

Batam, 13 Juli 2018

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam


NURZALIE, AP., S.Sos

PEMBINA TK.I

NIP.19730206 199311 1 001

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Landasan Hukum.....	2
1.3.Maksud dan Tujuan.....	3
1.4.Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENVANA KERJA TAHUN LALU	8
2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD.....	8
2.2.Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	29
2.4.Review Rancangan Awal RKPD.....	30
2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	37
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	37
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	41
3.3. Program dan Kegiatan.....	42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	48
BAB V PENUTUP	58

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang –undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam adalah dokumen perencanaan tahunan OPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan selanjutnya menjadi pedoman bagi OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam sebagai OPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban melaksanakan fungsi secara optimal melalui program-program yang telah ditetapkan pada RPJMD Kota Batam, sehingga dapat menyusun target kerja yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2019. Dengan demikian lebih memudahkan bagi OPD dalam mengukur dan mengevaluasi capaian kinerja yang telah dihasilkan pada tahun sebelumnya, dan menargetkan capaian kinerja pada tahun 2019.

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 (duapuluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja untuk perencanaan pembangunan tahunan.

Penyusunan dokumen rencana kerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rencana Rancangan Peraturan daerah tentang rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Demikian halnya dengan Rencana Satuan Polisi Pamong Kota Batam juga mengikuti poin-poin penting yang terdapat pada RKPD Kota Batam. Penetapan program prioritas berorientasi pada Ketentraman Umum dan Ketertiban, sehingga pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batam dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Rencana Kerja OPD harus mempunyai keterkaitan erat dengan RKPD, RPJMD dan juga memperhatikan RPJPD. Upaya untuk mensinergikan program dan kegiatan di tahun 2019 diantaranya melalui inventarisasi data, permasalahan dan potensi yang ada. Selain itu juga adanya usulan-usulan pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat pada saat pelaksanaan musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan dan kota, maupun usulan OPD terkait melalui forum OPD yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJJ) Nasional Tahun 2005- 2025;
6. Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

10. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rencana Rancangan Peraturan daerah tentang rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kota Batam.
17. Peraturan Walikota Batam nomor 43 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam 2019 disusun dengan maksud untuk :

1. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No.25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah menyusun perencanaan strategis.

2. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Kota Batam khususnya Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam rangka menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebagai bagian dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun Anggaran 2019;
3. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Kerja Tahun 2019 yang berpedoman pada RKPD Kota Batam.

b. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Satuan Polisi Pamong Praja Kerja Kota Batam Tahun 2019 adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dengan mempertimbangkan data yang telah diinventarisir, permasalahan dan potensi yang ada. Sehingga menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam Pembangunan di Kota Batam.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2019, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka menengah dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, Serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

Subbab ini berisi uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*);

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sub-bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antarancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dancatatan penting terhadap perbedaan dengan rancanganawal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dankegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Mengurai tentang program dan kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimanadimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Subbab ini menguraikan tentang program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab dan tupoksi OPD yang berpedoman pada RPJMD dan Renstra perangkat daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan Tahun 2019

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misalnya : Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi:
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

BAB V PENUTUP

Pada bab penutup ini disimpulkan tentang hal-hal berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Kegiatan merupakan tindakan konkrit yang dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan dengan mengacu kepada kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Jumlah seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam pada tahun 2017 sebanyak 3 (tiga) Program dan 7 (tujuh) kegiatan yang direncanakan.

Dari 3 (tiga) program dan 7 (tujuh) kegiatan yang ada pada Rencana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam pada tahun 2017 dan telah dilaksanakan, secara keseluruhan telah dilakukan evaluasi. Analisis diarahkan terhadap Capaian Indikator Kinerja Kegiatan yang menghasilkan nilai dengan katagori < 50 berkategori kurang, 50 – 79 berkategori cukup, dan capaian kinerja yang bernilai 80 sampai dengan 100 berkategori baik, serta capaian di atas nilai 100 yang ekstrim berkategori amat baik.

Evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan diarahkan terhadap indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari : *Input*, *Output* dan *Outcome*. Hasil evaluasi kinerja kegiatan menunjukkan capaian kinerja dari sebagian besar kegiatan antara 80% sampai dengan 100% yang mempunyai makna baik.

Hasil evaluasi terhadap program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kota Batam yang mempunyai visi agar “*Terwujudnya Ketetnraman dan Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah serta Perlindungan masyarakat* “ dapat dilihat pada tabel Capaian Kinerja Program dan Kegiatan yang dianalisis yaitu sebagai berikut :

a. Program : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Demi mewujudkan maksud dari Peraturan Daerah tersebut maka sangat diperlukan suatu Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah yang merupakan suatu proses berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit kerja untuk melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi demi menjamin agar pelaksanaan kebijakan

pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam diperlukan anggaran. Untuk anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam pada tahun 2017 adalah sebesar :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Murni Rp21.051.390.434,02 (*dua puluh satu milyar lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus tiga puluh empat koma nol dua rupiah*).
2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan sebesar Rp21.091.578.635,00 (*dua puluh satu milyar sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM TAHUN 2017

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%	SISA ANGGARAN Rp)
I	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	18.764.001.635,00	18.137.800.994,00	96.66 %	626.200.641,00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
2	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	595,305.000,00	396.245.000,00	66.56%	199.060.000,00
III	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				
3	Kegiatan Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar di Lahan Milik Pemerintah	534.702.000,00	521.892.000,00	97.60	12.810.000,00
4	Kegiatan Operasi Yustisi Terhadap Peraturan Daerah Kota Batam	143.070.000,00	89.875.000,00	62,82%	53.195.000,00
5	Pengawasan Tempat Hiburan Malam Selama Bulan Ramadhan	144.500.000,00	144.500.000,00	100%	0,00

6	Pengamanan Objek Vital dan Tempat Strategis Pemerintah Kota Batam	710.50.000,00	423.375.000,00	59,61%	286.875.000,00
7	Pembinaan Siskamling dan HUT Satlinmas	199.750.000,00	199.070.000,00	98,66%	2.680.000,00
	Jumlah	21.091.578.635,00	19.910.757.994,00	93,79%	1.180.820.641,00

Berdasarkan anggaran dan realisasi kegiatan, maka dapat dievaluasi nilai capaian masing-masing Evaluasi Kegiatan tersebut. Adapun Evaluasi dari hasil kegiatan dapat dilihat capaian sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2017 sebagai berikut :

I. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 .Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pencapaian sasaran 1 Tahun 2017

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persen	100%	100%	94,30%	100%	100%	96,66%

Untuk melaksanakan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja perlu didukung fasilitas administrasi perkantoran, agar capaian program akan terlaksana untuk memberikan pelayanan dalam kenyamanan masyarakat dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih tangguh, tampil professional dan tepat sasaran dalam menjalankan tugas. Anggaran Kegiatan Administarasi Perkantoran mengalami kenaikan anggaran dari APBD Murni 2017 Rp21.051.390.434,02 dengan jumlah kenaikan Rp40.188.200,00 dengan total APBD Perubahan seluruhnya Rp21.091.578.635,00. Secara umum kegiatan ini telah terealisasi dengan baik sedangkan secara fisik keuangan hanya terserap sekitar Rp18.137.800.994,00 atau sekitar 96,66 % (*sembilan puluh enam koma enam-enam*).

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pencapaian sasaran 1 Tahun 2017

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran	Persen	100%	100%	97.82%	100 %	66.56 %	100 %

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam menjalankan aktivitas sebelumnya masih menyewa ruko dan kondisi yang belum representatif namun sekarang sudah pindah di mako yang baru (RSUD lama) yang berlokasi di Kecamatan Sagulung.

Anggaran kegiatan Sarana dan Prasarana Aparatur dari APBD Murni 2017 Rp369.995.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp225.310.000,00 dengan total APBD Perubahan seluruhnya Rp 595.305.000. Secara umum kegiatan ini telah terealisasi dengan baik. Anggaran kegiatan Sarana dan Prasarana Perkantoran mengalami kenaikan disebabkan adanya belanja pengadaan Meja, Kursi pimpinan, Instalasi meteran listrik serta yang lainnya.

III. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyaman Lingkungan Masyarakat

1. Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar di Lahan Milik Pemerintah

Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar di Lahan Milik Pemerintah Pencapaian sasaran 1 Tahun 2017

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016	Tahun 2017		Capaian Keuangan Tahun 2017
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Berkurangnya Rumah Liar dan Kios Liar di Lahan Milik	Lokasi	10	10	98,54 %	12 Kali	12 Kali	97.60%

Pemerintah							
------------	--	--	--	--	--	--	--

Anggaran Penertiban Rumah dan Kios di Lahan Milik Pemerintah tidak mengalami perubahan anggaran, dari APBD Murni Tahun 2017 Rp534.702.000,00,00 dengan target awal 12 (*dua belas*) titik lokasi dan terealisasi 12 Titik lokasi dan capaian kinerja keuangan sebesar Rp521.892.000,00 dengan capaian target fisik sebesar 100 % (*seratus persen*).

Ada beberapa proyek/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2017 yaitu:

1. Penertiban Kios Liar Row dan Bangunan Liar di Lahan Milik Mesjid Raya Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji;
2. Penertiban Kios Liar dan Kios Liar dan Bangunan Liar diatas Drainase Kelurahan Sengkung Kecamatan Batu Ampar;
3. Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar di Row Jalan GMP sampai dengan jalan Lintas Mangsang Kelurahan Duri Angkang Kecamatan Sei Beduk;
4. Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar di Row Jalan Simpang Marina City sampai dengan Base Camp Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang;
5. Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar di Row Jalan Simpang Underpass Pelita Simpang Telkom; Pelita dan Simpang Irinco Kelurahan Pelita Kecamatan Lubuk Baja;
6. Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar dan Bangunan Depan Ruko Bunga Raya Batam Center s/d Bundaran SMU 3 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota;
7. Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar dan Bangunan di Atas Lahan Pasir Putih Kelurahan Kibing Kecamatan Batu Aji;
8. Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar di Row Jalan Anggrek 3 s/d Simp. Orchid Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota;
9. Penertiban Jalan Muka Kuning s/d Tg. Piayu Kelurahan Mangsang Kecamatan Sei Beduk;
10. Penertiban Bangunan dan Rumah Liar di Perum. Tembesi Raya Kelurahan Kibing Kecamatan Batu Aji;
11. Penertiban Bangunan Liar Dan Kios Liar di Row Jalan Taman Kota Kelurahan Baloi Center Kecamatan Lubuk Baja;

12. Penertiban Bangunan Liar dan Kios Liar di Simpang Baloi Kelurahan Baloi Centre Kecamatan Lubuk Baja.

2. Operasi Yustisi terhadap Peraturan Daerah Kota Batam

**Operasi Yustisi Terhadap Peraturan Daerah Kota Batam
Pencapaian sasaran 1 Tahun 2017**

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Berkurangnya Pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan oleh masyarakat	Kali	6	6	99,34 %	12	10	62,82 %

Anggaran Operasi Yustisi Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Batam tidak mengalami perubahan anggaran dari APBD Murni Tahun 2017 tetapi mengalami rasionalisasi dari Rp143.070.000,00 dengan total seluruhnya menjadi Rp89.875.000,00 dengan target dengan capaian fisik kinerja berjumlah 10 (sepuluh) kali pelaksanaan dari target awal sebanyak 12 (dua belas) kali kegiatan atau sekitar 62.82 % (*enam puluh dua koma delapan puluh dua persen*).

Adapun Pelaksanaan Operasi Yustisi Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Batam yang telah dilaksanakan dalam mendukung Program Pemerintah di Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Tanggal 30 Maret 2017 dilaksanakan Operasi Yustisi di daerah Kecamatan Sagulung tentang **Ketertiban Umum Perda Nomor : 16 Tahun 2007** dan dilaksanakan Persidangan.
2. Tanggal 18 April 2017 dilaksanakan Operasi Yustisi di daerah Kecamatan Batam Kota tentang **Ketertiban Umum Perda Nomor : 16 Tahun 2007** dan dilaksanakan Persidangan.

3. Tanggal 20 April 2017 dilaksanakan Operasi Yustisi di daerah Kecamatan Bengkong tentang **Ketertiban Umum Perda Nomor : 16 Tahun 2007** dan telah dilaksanakan Persidangan.
4. Tanggal 16 Mei 2017 dilaksanakan Operasi Yustisi di daerah Kecamatan Sekupang tentang **Ketertiban Umum Perda Nomor : 16 Tahun 2007** dan tidak dilaksanakan Persidangan karena sudah mematuhi aturan.
5. Tanggal 24 Mei 2017 dilaksanakan Operasi Yustisi di daerah Kecamatan Sei Beduk tentang **Ketertiban Umum Perda Nomor : 16 Tahun 2007** dan tidak dilaksanakan Persidangan karena sudah mematuhi aturan
6. Tanggal 22 Juli 2017 dilaksanakan Operasi Yustisi di daerah Kecamatan Sei Beduk Kelurahan Muka Kuning tentang **Ketertiban Sosial Perda Nomor 6 Tahun 2002** dan Penanganan Perdagangan Orang Kota Batam **Perda Nomor : 5 Tahun 2013** dan telah dilaksanakan Persidangan dan telah dibuat BAP dan Surat Pernyataan dan Jumlah 16 Orang yang terjaring.
7. Tanggal 24 Agustus 2017 dilaksanakan Operasi Yustisi di daerah Kecamatan Sagulung tentang **Perda Nomor : 19 Tahun 2001** tentang Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Kota Batam dan tidak dilaksanakan Persidangan karena sudah mematuhi aturan 2 Orang yang terjaring.
8. Tanggal 28 Agustus 2017 dilaksanakan Operasi Yustisi di daerah Kecamatan Sagulung tentang **Perda Nomor : 19 Tahun 2001** tentang Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Kota Batam dan tidak dilaksanakan Persidangan karena sudah mematuhi aturan 2 Orang yang terjaring.
9. Tanggal 28 September 2017 dilaksanakan Operasi Yustisi di daerah Kecamatan Batu Aji tentang **Perda Nomor : 6 Tahun 2002** tentang Ketertiban Sosial dan **Perda Nomor 5 Tahun 2013** tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang Kota Batam dan tidak dilaksanakan Persidangan karena sudah mematuhi Perda dan 5 Orang yang terjaring.

3. Pengawasan Terhadap Hiburan Malam selama Bulan Ramadhan

**Pengawasan Tempat Hiburan Malam selama Bulan Ramadhan
Pencapaian sasaran 1 Tahun 2017**

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Terlaksananya Pengawasan Tempat Hiburan Malam Selama Bulan Suci Ramadhan	Hari	30 Hari	30 Hari	99,04%	25 Hari	25 Hari	100 %

Untuk menciptakan keamanan dan ketertiban umum selama bulan Ramadhan Satpol PP Kota Batam dalam pengawasan THM selama Bulan Suci Ramadhan menjalankan surat edaran Walikota Batam tentang Jam Buka dan Jam Tutup THM selama Bulan Suci Ramadhan didalam menjalankan tugas.

Satpol PP Kota Batam dan Tim Terpadu sering terkendala di lapangan sebagian tempat hiburan tidak mematuhi surat edaran Walikota, sehingga selama Bulan Suci Ramadhan banyak tempat hiburan diberikan surat teguran SP1 dan SP2.

Kendala yang lain di lapangan adanya oknum-oknum yang mem-back up tempat hiburan tersebut sehingga mereka tetap buka dan tutup diluar jam yang telah ditentukan.

Kegiatan Pengawasan Tempat Hiburan Malam (THM) secara fisik dilapangan sudah terselesaikan selama 25 hari. Sedangkan Secara Realisasi Keuangan hanya terserap Rp 144.500.000.00 dari anggaran Rp149.000.000.00 dengan capaian keuangan 100% (*seratus persen*).

4. Pengamanan Objek Vital dan Tempat Strategis Pemerintah Kota Batam

**Pengamanan Objek Vital dan Tempat Strategis Pemerintah Kota Batam
Pencapaian sasaran 1 Tahun 2017**

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah Unjuk Rasa yang bersifat anarkis yang telah dikendalikan	Lokasi	100%	100%	96,42%	25 Kali	25 Kaili	59.61%

Kota Batam dapat dikatakan miniaturnya Indonesia karena hampir semua etnis dan agama terdapat di Kota ini. Letak yang sangat strategis ini memiliki implikasi positif yang menguntungkan bagi perkembangan investasi dan pertumbuhan perindustrian dan bidang-bidang jasa lainnya.

Namun disisi lain dapat juga memicu munculnya berbagai gangguan terhadap ketahanan baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Salah satunya adalah sering terjadi Demonstrasi dari beberapa elemen masyarakat. Penyampaian aspirasi oleh beberapa elemen-elemen masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi, dengan pengerahan masa turun kejalan menyampaikan tuntutan mereka. Aksi damai, seringkali tanpa disadari terkontaminasi sebagai akibat diprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga mengarah untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu. Demonstrasi elemen masyarakat juga disampaikan kepada dinas/instansi dilingkungan Pemerintah Kota Batam dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam. Pelaksanaan Demonstrasi dilakukan di kantor Pemerintah Kota Batam, DPRD Kota Batam dan di kantor-kantor instansi pemerintahan lainnya.

Anggaran Pengamanan Objek Vital dan Tempat Strategis Pemerintah Kota Batam mendapat alokasi anggaran melalui APBD 2017 sebesar Rp522.750.000,00 dan mengalami penambahan menjadi Rp710.250.000,00. Dengan penyerapan anggaran

sebesar Rp423.375.000,00. Kegiatan pengamanan ini juga melibatkan instansi seperti TNI, POLRI, dan instansi lainnya.

Kegiatan Pengaman Objek Vital dan Strategis Pemerintah Kota Batam secara fisik dilapangan sudah terselesaikan dengan jumlah peristiwa sebanyak 25 (Dua puluh lima terjadi di peristiwa unjuk rasa) selama tahun 2017. Adapun Pelaksanaan Kegiatan Objek Vital dan Tempat Strategis Kota Batam yang telah dilaksanakan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Demo dari Forum RT/RW Se Kecamatan Batu Aji;
2. Demo Mahasiswa dan Rakyat Kota Batam;
3. Demo dari Komunitas Batam Anti Hoax;
4. Demo Buruh FSPMI;
5. Demo Jackpot;
6. Demo dari BEM Mahasiswa Ibnu sina;
7. Demo dari Garda Indonesia;
8. Demo Aliansi Peduli Listrik Batam;
9. Demo dari Perpat (Nanas dan Ubi);
10. Demo dari Gerakan Aktivis (GRAVIS) Kepri;
11. Pengamanan Seleksi Tilawatil Quran (STQ) VI Tingkat Kota Batam;
12. Silaturahmi Walikota dan Artis Ibukota Tukul Arwana, Nita Tahlia, dan Trio Ambisi;
13. Demo Aliansi Masyarakat Peduli Listrik Batam (AMPLI – BATAM);
14. Demo dari Gerakan Mahasiswa Kepulauan Riau (GEMA KEPRI);
15. Demo Badan Eksekutid Mahasiswa (BEM) STIE Ibnu Sina;
16. Peletakan Batu Pertama Masjid Agung;
17. Demo May Day;
18. Pengamanan STQ Kepri;
19. Demo Pangkalan Ojek;
20. Demo Penolakan Kenaikan Tarif Listrik;
21. Simulasi Kamtibnas di Kota Batam;
22. Demo Kenaikan TDL Listrik;
23. Demo dari Forum Taxi Kota Batam;
24. Demo KC – FSPMI Kota Batam;

25. Pengamanan Pawai Pembangunan dan Malam Puncak Pesta Rakyat.

5. Pembinaan Siskamling dan Peringatan HUT Satlinmas

**Pembinaan Siskamling dan Peringatan HUT Satlinmas
Pencapaian sasaran 1 Tahun 2017**

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Jumlah anggota Linmas yang diberdayakan	orang	60 orang	60 orang	96.66%	80 orang	80 orang	98.66%

Sebagai upaya untuk mengoptimalkan dan memasyarakatkan program sistem keamanan lingkungan (Siskamling) di kalangan masyarakat, sangat diperlukan pembinaan anggota Satlinmas yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan rakyat terlatih pada pengembangan daya tangkal bangsa dan negara, khususnya lingkungan masyarakat dengan maksud agar fungsi ketertiban umum, perlindungan, dan ketentraman masyarakat dapat lebih terjamin pelaksanaannya. Oleh karena itu keberadaan anggota Linmas sangat penting dan dibutuhkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Oleh karena itu Satlinmas perlu terus diberdayakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjaga keamanan lingkungan, membantu dalam penanganan bencana, juga ikut serta dalam penanganan momen-momen yang bersifat lokal maupun nasional, seperti antara lain Pemilihan Umum anggota Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Kegiatan Pembinaan Siskamling dan HUT Satlinmas mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 199.750.000,00. Secara fisik dilapangan sudah terselesaikan dilaksanakan. Sedangkan secara Realisasi Keuangan hanya terserap Rp197.070,00,00 dari anggaran Rp199.750.000,00 atau 98,66 % (*sembilan puluh delapan koma enam puluh enam persen*).

Adapun dasar kegiatan Pembinaan siskamling dan Peringatan HUT Satlinmas adalah DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam TA.2017 dengan Nomor rekening kegiatan 1.19.1.19.26.016.024 sebagai berikut :

Pelaksanaan pekerjaan ini diharapkan agar pembinaan siskamling dapat berjalan dengan baik sehingga peranan terutama dalam membantu keamanan dan ketertiban masyarakat di Korta Batam. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pelatihan dan pembinaan anggota Linmas yang berlokasi di Hotel BCH di Penuin pada tanggal Rabu, Kamis dan Jum'at, 18-20 Mei 2017 dengan jumlah Peserta berjumlah 80 (*delapan puluh*) orang.

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam telah dapat melaksanakan Program dan kegiatan pada tahun 2017 dengan hasil cukup memuaskan. Dengan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.091.578.635.000,00 (*Dua Puluh Satu Milyar Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh lima Rupiah*) dari APBD Pemerintah Kota Batam.

Terlaksananya *good government* merupakan persyaratan bagi setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam merupakan salah satu penyelenggaraan Pemerintah dalam rangka memberikan Pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi yang telah dijabarkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2011-2016 untuk menetapkan Prioritas program dan kegiatan pembangunan melalui sumber dana APBD maupun dana dari APBN.

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018
Kota Batam

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.	Urusan: Non Urusan									
1.01.	Bidang urusan: Wajib Pelayanan Dasar									
I	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang menunjang Tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah								
1	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
II	Program Peningkatan Sarana dan Prsarana Aparatur	Meningkatkannya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung Kelancarna tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah								

2	Kegiatan Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Kegiatan Saranan dan Prasarana Perkantoran (DAK)											
1.	Urusan: Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri											
1.01.	Bidang urusan: Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
III	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat	Jumlah Penegakan Perda										
4	Kegiatan Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar dilahan milik pemerintah	Berkurangnya Rumah Liar dan Kios Liar dilahan milik pemerintah	12 Kali	10 kali	12 Kali	12 Kali	100 %	15 kali	37 kali			
5	Kegiatan pendataan dan penataan Rumah Liar dan Kios Liar se kota Batam	Tertatanya pendataan dan penataan Rumah Liar dan Kios Liar se Jalan kota Batam	10 titik	-	-	-	-	10 titik	10 titik			
6	Kegiatan Operasi Yustisi Terhadap Peraturan Daerah Kota Batam	Pahamnya masyarakat terhadap Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Batam yang telah diundang-undangan	19 Kali	-	12 Kali	10 Kali	83.33 %	19 kali	29 kali			
7	Kegiatan Sosialisasi Penyuluhan Peraturan Daerah Kota Batam	Terlaksananya sosialisasi penyelenggaraan Linmas	630 Orang	-	-	-	-	720 orang	720 orang			
8	Pengawasan Tempat Hiburan Malam selama bulan suci Ramadha	Perkendalinya jam operasional Tempat Hiburan Malam selama bulan suci Ramadha	30 Hari	30 Hari	30 Hari	25 Hari	83.33 %	30 hari	85 hari			

9	Pengawasan Pelaksanaan Ketertiban dan Ketertiban umum	Pahaminya masyarakat terhadap Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Batam yang telah diundang-undangan	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	24 bulan
10	Pengamanan Objek Vital dan Tempat Strategis Pemerintah Kota Batam	Terlaksananya pengawasan unjuk rasa yang mengarah ke tindakan anarkis	25 Kali	12 bulan	25 Kali	25 Kali	100 %	25 kali	62 kali	
11	Pembinaan Siskamling dan Peringatan Hut Satlinmas	Terlaksananya pembinaan Siskamling dan peringatan HUT Satlinmas tingkat kota Batam	120 Orang	60 orang	120 Orang	80 Orang	66.66%	120 orang	260 kali	
12	Sosialisasi Penyelenggaraan Linmas	Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Linmas	120 Orang	-	-	-	-	120 orang	120 orang	
13	Kegiatan Peningkatan Dumber Daya Linmas Dalam Penanggulangan Risiko Bencana	Terlaksananya pelatihan peningkatan SDM Linmas dalam penanggulangan Risiko Bencana	101 Orang	-	-	-	-	101 orang	101 orang	
14	Peningkatan Pengamanan Pemilu Legislatif	Terlaksananya Pengamanan Pemilu Legislatif	2100 TPS	-	-	-	-	-	-	
15	Peningkatan Pengamanan Pemilu Presiden	Terlaksananya pengamanan Pemilu Presiden	2100 TPS	-	-	-	-	-	-	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Karakteristik masyarakat Kota Batam yang heterogen dengan multi kultur merupakan Khasanah kekayaan budaya, letak Kotak Batam yang sangat Strategis geopolitik berbatasan langsung dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia yang merupakan pintu gerbang wilayah barat dan lalu lintas perdagangan Internasional.

Kota Batam dapat dikatakan miniatur Indonesia karena hampir semua etnis dan agama terdapat di Kota ini. Letak yang sangat strategis ini memiliki implikasi positif yang menguntungkan bagi perkembangan investasi dan pertumbuhan perindustrian dan bidang-bidang jasa lainnya, namun disisi lain dapat juga memicu munculnya berbagai gangguan terhadap ketahanan baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, social, budaya dan keamanan.

Untuk lebih memfokuskan strategi Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien, diperlukan analisa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Praja Kota Batam sebagai berikut :

- a) Terbatasnya Sumber daya aparatur yang dimiliki terutama pada kualitas dan kurangnya kompetensi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan dan ketertiban umum serta Peraturan daerah terutama memahami paraturan Perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b) Terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja kota Batam dalam mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan sehingga capaian kinerja yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal tidak mencapai target.
- c) Minimnya anggaran yang dialokasikan beberapa kegiatan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam kurang mencukupi sehingga menghasilkan kinerja kurang memuaskan.

- d) Masih banyaknya masyarakat dan atau Badan Hukum yang belum paham tentang produk Hukum Daerah, dan hal ini menjadi masalah bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam untuk bekerja lebih maksimal.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam sebagai OPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, melaksanakan fungsi secara optimal melalui program-program yang telah ditetapkan pada RPJMD Kota Batam, sehingga dapat menyusun target kerja yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam pada tahun 2017. Dengan demikian lebih memudahkan bagi OPD dalam mengukur dan mengevaluasi capaian kinerja yang telah dihasilkan pada tahun sebelumnya, dan menargetkan capaian kinerja pada tahun 2019.

Untuk mencapai visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam melaksanakan program kerja strategis 5 (lima) tahunan sebagai strategi dan kebijakan yang ditetapkan strategi inti (*core strategy*) dan kebijakan inti (*core policy*) dan diwujudkan dalam beberapa program. Program yang akan dilaksanakan Satuan Polisi pamong Praja Kota Batam adalah merupakan strategi pada tingkat kebijakan. Strategi berupa pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil jika implementasi program tersebut sesuai dengan visi dan misi yang emban. Sehingga ada keterkaitan antara program Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dengan program Pemko Batam menjadi mutlak.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Walikota Batam Nomor : 43 Tahun 2016 tentang uraian Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam mempunyai tugas pokok :

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan
- (2) Kepala Satuan mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang ketentraman, ketertiban umum,

penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Satuan mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis operasional di bidang ketentraman dan ketertiban umum, bidang penegakan perundang-undangan daerah, bidang sumber daya aparatur, bidang perlindungan masyarakat.
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketentraman, ketertiban umum, penegakan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat.
 - c. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan di bidang ketentraman, ketertiban ketertiban umum, penegakan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat.
 - d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
- d. Bidang Sumber Daya Aparatur;
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam pelaksanaannya, baik program dan kegiatan tidak terlepas dari adanya hambatan-hambatan baik internal maupun eksternal yang ditemui seperti :

1. Masih belum optimalnya pengetahuan dan keterampilan para pengelola keuangan terhadap mekanisme pengelolaan keuangan. Sehingga tindakan antisipatif untuk menghadapi berbagai kemungkinan tidak dapat diambil secara efektif dan efisien.

2. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur sehingga keseimbangan beban tugas menjadi tidak merata.
3. Masih kurangnya koordinasi berbagai instansi terkait, sehingga kelancaran informasi pembangunan menjadi terhambat.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam melakukan upaya pembinaan dan peningkatan intensitas koordinasi, kebijakan penganggaran, serta pembenahan sumber daya manusia di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam melalui diklat ataupun mengusulkan penambahan aparatur sesuai dengan bidang tugas yang dibutuhkan.

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satpol PP
Kota Batam

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017 (n-2)	Tahun 2018 (n-1)	Tahun 2019 (tahun n)	Tahun 2020 (n+1)	Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (thn n)	Tahun 2020 (thn n+1)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
I	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran													
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur													
	Kegiatan Sarana dan Prasarana Aparatur			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
III	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat													
	Kegiatan Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar dilahan milik pemerintah			15 Kali	15 Kali	15 kali	15 kali	12 kali	-	15 kali	15 kali	15 kali		
	Kegiatan pendataan dan penataan Rumah Liar dan Kios Liar se kota Batam			10 Titik	10 Titik	10 Titik	10 Titik	-	-	10 Titik	10 Titik	10 Titik		
	Kegiatan Operasi Yustisi Terhadap Peraturan Daerah Kota Batam			19 kali	19 kali	15 kali	12 Kali	10 kali	-	19 Kali	15 Kali	15 Kali		

Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Peraturan Daerah Kota Batam	720 Org	630 Org	1125 Org	-	-	630 Org	1125 Org	-	630 Org	1125 Org
Pengawasan Tempat Hiburan Malam selama bulan suci Ramadhan	30 Hari	30 hari	30 hari	30 hari	-	30 hari	30 Hari	-	30 Hari	30 Hari
Pengawasan Pelanggaran dan Ketertiban Umum	12 Bln	12 Bln	12 Bln	-	-	12 Bln	12 Bln	-	12 Bln	12 Bln
Pengamanan Objek Vital dan Tempat Strategis Pemerintah Kota Batam	25 Kali	25 Kali	25 Kali	25 Kali	-	25 Kali	25 Kali	-	25 Kali	25 Kali
Pembinaan Siskmling dan Peringatan Hut Satlinmas	120 Org	120 Org	120 Org	60 Org	-	120 Org	120 Org	-	120 Org	120 Org
Sosialisasi Penyelenggaraan Linmas	120 Org	120 Org	0 Org	-	-	120 Org	0 Org	-	120 Org	-
Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Linmas dalam Penanggulangan Risiko Bencana	101 Org	101 Org	101 Org	-	-	101 Org	101 Org	-	101 Org	101 Org
Pengamanan Pemilu Legislatif dan Presiden		2400 TPS	-	-	-		-	-	-	-

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan beberapa cara. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam memandang bahwa untuk pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan.

Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan diwujudkan melalui garis-garis kebijaksanaan, rangkaian program dan kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

Kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang bersifat makro telah dirumuskan secara mendasar pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2016 – 2021 yang tidak terlepas dari Renstra Kota Batam.

Adapun strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja dan mempertegas peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam sesuai dengan tugas pembantuan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur sipil Negara yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan secara lebih transparan dan akuntabel.
3. Memanfaatkan peraturan daerah Kota Batam yang ada dalam pengembangan fungsi dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.
4. Optimalisasi anggaran dalam melakukan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.
5. Menetapkan standar dan prosedur kerja yang jelas untuk mengembangkan urusan kewenangan yang ada.
6. Menetapkan *reward and punishment* dengan standard kriteria kinerja yang pasti.
7. Memperdayakan SDM perencanaan dalam merumuskan SPM perencanaan yang belum terbentuk.
8. Memperdayakan peran SDM Aparatur dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ketenagakerjaan.

9. Mengoptimalkan SDM pengelola keuangan dalam perencanaan dan pengendalian anggaran.
10. Mewujudkan ketersediaan data/informasi dan system informasi pembangunan sebagai upaya dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan.
11. Mensinergikan antara perencanaan sektoral dengan RKPD.
12. Mempercepat terbentuknya jabatan fungsional untuk mengantisipasi kebutuhan tenaga teknis dilapangan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam RPJMD Kota Batam tahun 2016-2021 Satuan Polisi Pamong Praja yang bertanggungjawab atas Ketentraman dan ketertiban umum, Penegakan Perda serta Perlindungan Masyarakat tercantum dalam misi Walikota Batam yang pertama yaitu *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Mengayomi* dengan program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja berkewajiban mendukung pelaksanaan RPJMD Kota Batam 2016-2021 yang tercermin dari penciptaan situasi kota yang aman dan tentram serta kondusif sehingga rencana pembangunan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana awal yang sudah ditentukan.

Sehubungan dengan hubungan yang dimaksud diatas, dalam rangka meningkatkan kualitas keamanan dan kenyamanan serta ketertiban umum di wilayah kota Batam, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam merencanakan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan sebagai mana tabel T-C.31 review RKPD dibawah ini.

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Administrasi Perkantoran yang menunjang Tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	100%	18.779.269.093.7 2	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Batam	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang menunjang Tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	100%	18.779.269.093.7 2	
1	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Batam	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang menunjang Tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	100%	18.779.269.093.7 2	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Batam	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang menunjang Tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	100%	18.779.269.093.7 2	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatkannya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung Kelancaran tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	100%	621.888.000.00	Kegiatan Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur	Batam	Meningkatkannya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung Kelancaran tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	100%	621.888.000.00	
2	Kegiatan Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur	Kota Batam	Meningkatkan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	621.888.000.00	Kegiatan Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur	Batam	Meningkatkan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	621.888.000.00	

3	Kegiatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (DAK)																							
III	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat	Jumlah Penegakan Perda																						
4	Kegiatan Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar dilahan milik pemerintah	Berkurangnya Rumah Liar dan Kios Liar dilahan milik pemerintah	Kota Batam	12 kali	366.816.000.00	12 kali	Berkurangnya Rumah Liar dan Kios Liar dilahan milik pemerintah	Batam	Kegiatan Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar dilahan milik pemerintah	Batam	15 kali	366.816.000.00												
5	Kegiatan Operasi Yustisi Terhadap Peraturan Daerah Kota Batam	Pahaminya masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kota Batam yang telah diundang-undangkan	Kota Batam	12 kali	426.750.000.00	12 kali	Pahaminya masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kota Batam yang telah diundang-undangkan	Batam	Kegiatan Operasi Yustisi Terhadap Peraturan Daerah Kota Batam	Batam	19 kali	426.750.000.00												
6	Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Peraturan Daerah Kota Batam	Terlaksananya sosialisasi penyelenggaraan Linmas	Kota Batam		73.330.000.00		Terlaksananya sosialisasi penyelenggaraan Linmas	Batam	Kegiatan Sosialisasi Penyuluhan Peraturan Daerah Kota Batam	Batam	720 org	73.330.000.00												
7	Pengawasan Tempat Hiburan Malam selama bulan suci Ramadhan	Perkendalinya jam operasional Tempat Hiburan Malam selama bulan suci Ramadhan	Kota Batam	25 hari	420.000.000.00	25 hari	Perkendalinya jam operasional Tempat Hiburan Malam selama bulan suci Ramadhan	Batam	Pengawasan Tempat Hiburan Malam selama bulan suci Ramadhan	Batam	25 hari	420.000.000.00												
8	Pengawasan Pelanggaran Ketertarikan dan Ketertiban umum	Pahaminya masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kota Batam yang telah diundang-undangkan	Kota Batam		-		Pahaminya masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kota Batam yang telah diundang-undangkan	-	Pengawasan Pelanggaran Ketertarikan dan Ketertiban umum	-	-	-												

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat Kecamatan belum ada usulan dari masyarakat untuk tahun perencanaan 2019. Namun Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam tetap mengakomodir kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kepentingan masyarakat, tetapi besaran anggaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan dari Perangkat Daerah.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Kota Batam

Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Batam			
1	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Batam	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	19.162.554.793,72	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
2	Kegiatan Saranan dan Prasarana Aparatur	Batam	Meningkatnya Kebutuhan sarana dan prasaranan aparatur	621.888.000.00	
	Kegiatan Saranan dan Prasarana Aparatur (DAK)	Batam			
III	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat	Batam	Jumlah Penegakan Perda		
3	Kegiatan Penerbitan Rumah Liar dan Kios Liar dilahan milik pemerintah	Batam	Berkurangnya Rumah Liar dan Kios Liar di Lahan Mililik Pemerintah	366.816.000,00	
4	Kegiatan Operasi Yustisi Terhadap Peraturan Daerah Kota Batam	Batam	Meningkatnya Kepatuhan	426.750.000,00	
5	Kegiatan Sosialisasi Penyuluhanb dan Peraturan Daerah Kota Batam	Batam	Pahamnya masyarakat terhadap Perda yang diundang-undangkan di Kota Batam	73.330.000,00	
6	Pengawasan Tempat Hiburan Malam selama bulan suci Ramadhan	Batam	Terkendalinya jam operasional tempat hiburan malam selama Bulan Suci Ramadhan	420.000.000,00	

7	Pengamanan Objek Vital dan Tempat Strategis Pemerintah Kota Batam	Batam	Terlaksananya pengawasan unjuk rasa yang mengarah ke tindakan anarkis	462.250.000,00	
8	Pembinaan Siskmling dan Peringatan Hut Satlinmas	Batam	Terlaksananya pembinaan Siskmling dan Peringatan HUT Satlinmas Tingkat Kota Batam	280.000.000,00	
9	Sosialisasi Penyelenggaraan Linmas	Batam	Terlaksananya sosialisasi penyelenggaraan Linmas	376.468.000,00	
10	Kegiatan Pelatihan Peningkatan Dumber Daya Linmas Dalam Penanggulangan Risiko Bencana	Batam	Terlaksananya pelatihan peningkatan SDM Linmas dalam penanggulangan Resiko Bencana	127.840.000,00	
11	Kegiatan Peningkatan Pengamanan Pemilu Legislatif dan Presiden	Batam	Terlaksananya Pengamanan Pemilu Legislatif dan Presiden	3.391.424.000,00.	
			Jumlah	25.709.320.793.72	

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, visi pembangunan nasional adalah "**Indonesia yang mandiri, adil dan makmur**".

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah menetapkan 8 (delapan) misi, yaitu:

- 1) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
- 2) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
- 3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
- 4) Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu;
- 5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
- 6) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;
- 7) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
- 8) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Strategi untuk melaksanakan Visi dan Misi tersebut dijabarkan secara bertahap dalam periode lima tahunan atau RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Masing-masing tahap mempunyai skala prioritas dan strategi pembangunan yang merupakan kesinambungan dari skala prioritas dan strategi pembangunan pada periode-periode sebelumnya.

Tahapan skala prioritas utama dan strategi RPJMN secara ringkas adalah sebagai berikut:

- 1) RPJMN ke-1 (2005–2009) diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat.

- 2) RPJMN ke-2 (2010–2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian.
- 3) RPJMN ke-3 (2015–2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan iptek yang terus meningkat.
- 4) RPJMN ke-4 (2020–2025) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang

Saat ini, kita sedang memasuki RPJMN ke-3 (2015-2019), yang disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (*Nawa Cita*) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla.

Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: **“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”**

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
- 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

- 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

- 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
- 2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa.
- 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Visi dan misi pembangunan pemerintah dalam RPJM Nasional harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam menyusun RPJM Daerah.

Dalam Kajian RPJMD 2016-2021, Visi Kota Batam 2016-2021 adalah **“Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera dan Bermartabat”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang ditetapkan adalah:

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel dan mengayomi;
- 2) Mewujudkan SDM daerah yang bertaqwa, berdaya saing dan masyarakat yang sejahtera;
- 3) Mewujudkan tata ruang kota yang berwawasan lingkungan, infrastruktur kota yang modern, serta penataan permukiman yang ramah, asri dan nyaman sesuai nilai budaya bangsa;
- 4) Mewujudkan penguatan sektor industri dan peningkatan peran sektor jasa, perdagangan, pariwisata, alih kapal, maritim dan pertanian/perikanan dalam menopang perekonomian daerah.;
- 5) Mewujudkan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan Koperasi yang bersinergi dengan kebutuhan industri dan pasar domestik;
- 6) Mewujudkan percepatan pembangunan di daerah hinterland sebagai penopang dan penyangga perekonomian Kota Batam.

Dalam RPJMD Kota Batam 2016-2021, Satuan Polisi Pamong Praja termasuk pada misi yang I (pertama) yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel dan mengayomi, dan memiliki visi “***Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penegak Peraturan Daerah serta Perlindungan masyarakat***“. Untuk mewujudkan visi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja kota Batam memiliki misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Polisi Pamong Praja agar lebih efektif , handal, tangguh dan profesional.
2. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai dalam menunjang kelancaran tugas.
3. Meningkatkan ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat menjalin kerjasama untuk penguatan Koordinasi, pengawasan dan pengendalian.
4. Mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui pelaksanaan Penegak Perda dan Keputusan Kepala Daerah.

5. Mewujudkan Koordinasi yang Sinergis antar Satuan Polisi Pamong Praja, Anggota Perlindungan Masyarakat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Aparatur Instansi Terkait lainnya, seperti TNI, POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari tujuan , sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencanan strategik , yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi OPD untuk mencapai dan melaksanakan dalam tahun tertentu.

Adapun struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam terdiri dari Sekretariat, Bidang Trantibum, Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, Bidang Sumber Daya Aparatur, Bidang Perlindungan Masyarakat.

Dengan berdasarkan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, sasaran target kinerja Renstra OPD dan RKPD, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- **Tujuan dan Sasaran**

- **Tujuan**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dan merealisasikan misi yang telah dirumuskan, perlu ditetapkan tujuan untuk suatu periode sebagai suatu ukuran keadaan yang ingin diwujudkan dalam skala periode terbatas (sampai dengan lima tahun).

Tujuan yang telah ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam mengacu sepenuhnya pada tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Batam,

dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Kota Batam keseluruhannya, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembinaan kualitas dan kapasitas kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan masyarakat
2. Meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dan atau Badan Hukum dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Memaksimalkan hubungan kerja sama dan koordinasi yang baik Dinas/Instansi dan aparat keamanan dalam menyelenggarakan penegakan Perda, Perkada Ketentraman dan Ketertiban Umum.

- **Sasaran**

Sasaran dan indikator tahun 2019 yang ingin diwujudkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kota Batam tetap mengacu sasaran dan indikator Pemerintah Kota Batam dengan beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan sesuai dengan kondisi dan kegiatan yang dapat dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas dan kapasitas kelembagaan Satuan Polisi Pamaong Praja dan Perlindungan Masyarakat.
2. Meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dan atau Badan Hukum dalam menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
3. Memaksimalkan hubungan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan Dinas /Instansi dan Aparat Keamanan dalam menyelenggarakan Perda atau Perkada Ketentraman dan Ketertiban umum.

3.3 Program dan Kegiatan

Visi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam adalah *“Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penegak Peraturan Daerah serta Perlindungan masyarakat”*, yang merupakan arah dan tujuan pencapaian kinerja yang akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam yang mengacu kepada Misi kepala daerah, dimana Satuan Polisi Pamong Praja termasuk pada misi yang misi yang I (pertama) dalam RPJMD Kota Batam 2016-2021” yaitu *Mewujudkan tata kelola pemerintahan*

yang baik, bersih, transparan, akuntabel dan mengayomi dengan tujuan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, Akuntabel, bersih dan transparan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima.

Untuk melaksanakan tujuan tersebut dilaksanakanlah Program dan Kegiatan yang tersebar di kota Batam tahun 2019 yang membutuhkan dana Rpagar tercapai Misi dan Visi Walikota Batam pada RPJMD 2016-2021.

Adapun Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dibagi atas 5 (lima) pernyataan misi dalam rangka mewujudkan visi dimaksud, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Komptensi Tenaga Kerja melalui Pelatihan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja.
2. Meningkatkan Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
3. Meningkatkan Pelaksanaan Pembinaan Hubungan Industrial.
4. Terlaksananya Penyelesaian Perselisihan dan Kepatuhan hukum.
5. Mewujudkan pelayanan prima yang didukung oleh sarana dan prasarana perkantoran yang memadai dan sumber daya manusia yang berkualitas.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) OPD Tahun 2016-2021 maka secara sistematis diuraikan rekapitulasi program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2019 sebagaimana dijelaskan pada tabel matriks Rencana Kerja (Renja) TA. 2019 yang berisi urusan, program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target program dan kegiatan, lokasi program dan kegiatan, serta kebutuhan dana / pagu indikatif APBD untuk masing-masing program/kegiatan. Rencana Program dan Kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

- (a) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Pagu Anggaran Rp19.162.554.793,72

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- (a) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Pagu Anggaran Rp621.888.000.00

3. Program Kenyamanan Lingkungan Masyarakat

- (a) **Kegiatan Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar di Lahan Milik Pemerintah** Pagu Anggaran Rp366.816.000,00
- (b) **Kegiatan Operasi Yustisi Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Batam** dengan Pagu Anggaran Rp426.750.000,00
- (c) **Kegiatan Sosialisidan Penyuluhan Terhadap Peraturan Daerah Kota Batam** dengan Pagu Anggaran Rp73.330.000,00.
- (d) **Kegiatan Pengawasan Tempat Hiburan Malam selama bulan Suci Ramadhan** dengan Pagu Anggaran Rp420.000.000,00.
- (e) **Kegiatan Pengaman Objek Vital dan Tempat Strategis Pemerintah Kota Batam** dengan Pagu Anggaran Rp462.250.000,00.
- (f) **Kegiatan Pembinaan Siskamling dan Hut Satlinmas** dengan Pagu Anggaran Rp280.000.000,00.
- (g) **Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Linmas** dengan pagu anggaran Rp376.468.000,00.
- (h) **Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Linmas dalam Penanggulangan Risiko Bencana** dengan Pagu Anggaran Rp127.840.000.00
- (i) **Kegiatan Pengamanan Pemilu Legislatif dan Presiden** dengan Pagu Anggaran sebesar Rp3.391.424.000.00

Seiring berakhirnya MDGs (*Mid Development Goals*) pada tahun 2015, diskusi mengenai kerangka kerja pembangunan internasional pasca 2015 dimulai. pada pertemuan Rio +20 Summit, 192 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa memulai proses perancangan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs (*sustainable developmebt goals*) yang berorientasi pada aksi, ringkas, dan mudah dikomunikasikan, jumlah terbatas, aspiratif, bersifat global secara alamiah dan dapat diterapkan pada semua negara dengan memperhatikan perbedaan kenyataan, kapasitas dan tingkat pembangunan sebuah negara dan menghargai kebijakan dan prioritas nasional.

Pada tanggal 30 Mei 2013, *High level panel on the post-2015 Development Agenda* mrngeluarkan "*A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform*

Economies through Sustainable Development,” sebuah laporan yang menetapkan agenda universal untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim dari muka bumi pada tahun 2030, dan mewujudkan janji pembangunan berkelanjutan. Laporan ini mengajak seluruh warga dunia untuk bekerja sama dalam sebuah kemitraan global baru (*New Global Partnership*) yang menawarkan harapan dan peran bagi setiap orang.

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019
dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Kota Batam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020						
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
I	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran yg menunjang Tupoksi Perangkat Daerah											
1	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Batam	100%	19.162.554.793,72	APBD					25.548.056.963,00		
II	Program Peningkatan Sarana dan Prsarana Aparatur	Meningkat dan terpeliharanya sarana & prasarana yang mrndukung tupoksi Perangkat daerah											
2	Kegiatan Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Batam	100 %	621.888.0000.00	APBD					795.600.000,00		
III	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT/ Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat	Jumlah penegakan Perda											

3	Kegiatan Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar dilahan milik pemerintah	Berkurangnya Rumah Liar dan Kios Liar dilahan milik Pemerintah	Batam	12 Kali	366.816.000,00	APBD		1.529.777.500,00
4	Kegiatan pendataan dan penataan Rumah Liar dan Kios Liar se kota Batam	Kegiatan pendataan dan penataan Rumah Liar dan Kios Liar se kota Batam	-	-	-	-	-	-
5	Kegiatan Operasi Yustisi Terhadap Peraturan Daerah Kota Batam	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat terhadap hak & kewajiban	Batam	12 Kali	426.750.000,00	APBD		428.400.000,00
6	Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Peraturan Daerah Kota Batam	Pahaminya masyarakat terhadap Perda yang telah diundang-undangkan	Batam	630 orang	73.330.500,00	APBD		74.025.000,00
7	Pengawasan Tempat Hiburan Malam selama bulan suci Ramadhan	Terkendalinya jam operasional tempat hiburan malam selama bulan suci Ramadhan	Batam	25 Hari	420.000.000,00	APBD		420.425.000,00
8	Pengawasan Pelanggaran dan Keteriban Umum	Pengawasan Pelanggaran dan Keteriban Umum	Batam	0	0	APBD		150.000.000,00
9	Pengamanan Objek Vital dan Tempat Strategis Pemerintah Kota Batam	Terlaksananya pengawasan unjuk rasa yang mengarah ke tindakan anarkis	Batam	25 Kali	462.250.000,00	APBD		1.538.780.000,00
10	Pembinaan Siskrimling dan Peringatan Hut Satlimas	Terlaksananya pembinaan siskamling & peringatan HUT Satlimas tingkat kota Batam	Batam	120 orang	280.000.000,00	APBD		580.000.000,00
11	Sosialisasi Penyelenggaraan Linmas	Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Linmas	Batam	120 Orang	376.468.000,00	APBD		-
12	Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Linmas dan Penanggulangan Risiko Bencana	Terlaksananya pelatihan Peningkatan Sumber Daya Linmas dam Penanggulangan Risiko Bencana	Batam	101 Orang	127.840.000,00	APBD		520.000.000,00
13	Peningkatan Pengamanan Pemilu Legislatif dan Presiden	Terlaksananya pengamanan pemilu Legislatif yang tertib, aman dan terkendali	Batam	4200 TPS	3.391.424.0000,00	APBD		-

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kualitas tatakelola pemerintahan (*good governance*) adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan daerah, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat, serta peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hal ini sejalan dengan salah satu prioritas pembangunan pemerintah saat ini yakni mewujudkan “*Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya*”.

Tujuan dan Sasaran merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai /dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Untuk tercapainya Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke beberapa program dan kegiatan yang satu sama lain merupakan satu kesatuan yang saling ketergantungan.

Sasaran RENJA adalah mengacu untuk pencapaian sasaran RENSTRA yaitu:

- a. Meningkatnya pembinaan kualitas dan kapasitas Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
- b. Meningkatnya kepatuhan dan kesadaran masyarakat dan atau Badan Hukum dalam menciptakan Ketertnraman dan Ketertiban Umum
- c. Memaksimalkan hubungan Kerja sama dan Koordinasi yang baik dengan Dinas/Instansi dan Aparat Keamanan dalam menyelenggarakan Penegakan Perda, Perkada dan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan program.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja dan Peraturan Daerah Nomor : 43 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam maka Satuan Polisi Pamong Praja telah mengalami Perubahan Struktur Organisasi serta Eselonisasi di Satuan Polisi Pamong Praja. Sejalan dengan perubahan Struktur Organisasi dengan demikian Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam beberapa program /kegiatan bertambah.

Program dan kegiatan Tahun 2016-2021 Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam disusun dengan pertimbangan kebutuhan ditengah masyarakat. Melalui penyelarasan program kegiatan dari unit kerja dengan skala prioritas usulan di tingkat kelurahan dan kecamatan serta memperhatikan aspirasi masyarakat dan hasil reses dewan, maka disusunlah prioritas Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016-2021 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam sebagai berikut :

Sebanyak 3 (Tiga) program dalam RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam tahun 2019 akan diuraikan kedalam beberapa kegiatan yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan rencana anggaran sebesar **Rp19.162.554.793,72.** (*sembilan belas milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga koma tujuh puluh dua rupiah*) yang berasal dari dana APBD.

1. **Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Untuk melaksanakan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja perlu didukung fasilitas administrasi Perkantoran , agar capaian program akan terlaksana untuk memberikan pelayanan dalam kenyamanan masyarakat dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih tangguh, tampil profesional dan tepat sasaran dalam menjalankan tugas.

Indikator Kinerja : Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan	: Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, bersih, dan transparan.
Sasaran	: Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan berkualitas.
Lokasi	: Kota Batam
Dana	: Rp19.162.554.793,72 (<i>sembilan belas milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga koma tujuh puluh dua rupiah</i>)
Sumber Dana	: APBD

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur dengan rencana anggaran sebesar **Rp621.888.000.** (*enam ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*)

1. Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.

Untuk melaksanakan Program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja perlu didukung dengan sarana dan prasarana perkantoran. Hal ini sejalan dengan Perubahan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam maka sarana prasarana perkantoran sangat mendukung dalam kegiatan pelaksanaan pekerjaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Indikator Kinerja	: Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur
Tujuan	: Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, bersih, dan transparan.
Sasaran	: Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan berkualitas.
Lokasi	: Kota Batam
Dana	: Rp621.888.000.00 (<i>enam ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah</i>)
Sumber Dana	: APBD

3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat dengan rincian rencana anggaran sebagai berikut :

1. Kegiatan Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar di Lahan Milik Pemerintah.

Tingginya migrasi dari luar Kota Batam yang ingin mencari pekerjaan di Batam, sehingga sarana dan prasarana khususnya perumahan untuk pekerja tidak semuanya mampu disediakan oleh pihak pengelola kawasan industri, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tingkat pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dalam mencari pekerjaan akibatnya mereka menempuh mendirikan bangunan dilahan kosong untuk tempat tinggal dan mendirikan kios dijalan.

Indikator Kinerja	:	Jumlah Penegakan Perda
Tujuan	:	Meningkatkan peranan pemerintah dalam mengayomi kehidupan bermasyarakat
Sasaran	:	Meningkatkannya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
Lokasi	:	Kota Batam
Dana	:	Rp366.816.000,00 (<i>tiga ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu rupiah</i>)
Sumber Dana	:	APBD

2. Pengamanan Objek Vital dan Tempat Strategis Pemerintah Kota Batam

Karakteristik masyarakat Batam yang heterogen dengan multi kultur merupakan khasanah kekayaan budaya, letak Kota Batam yang sangat strategis secara geopolitik berbatasan langsung dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia yang merupakan pintu gerbang wilayah barat dan lalu lintas perdagangan internasional.

Kota Batam dapat dikatakan miniaturnya Indonesia karena hampir semua etnis dan agama terdapat di Kota ini. Letak yang sangat strategis ini memiliki

implikasi positif yang menguntungkan bagi perkembangan investasi dan pertumbuhan perindustrian dan bidang-bidang jasa lainnya.

Namun disisi lain dapat juga memicu munculnya berbagai gangguan terhadap ketahanan baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Salah satunya adalah sering terjadi Demontrasi dari beberapa elemen masyarakat. Penyampaian aspirasi oleh beberapa elemen-elemen masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi, dengan pengerahan masa turun kejalan menyampaikan tuntutan mereka. Aksi damai, seringkali tanpa disadari terkontaminasi sebagai akibat diprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga mengarah untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu. Demonstrasi elemen masyarakat juga disampaikan kepada dinas/instansi dilingkungan Pemerintah Kota Batam dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam. Pelaksanaan Demontrasi dilakukan di kantor Pemerintah Kota Batam, DPRD Kota Batam dan di kantor-kantor instansi pemerintahan lainnya.

Indikator Kinerja	: Jumlah demo yang diamankan
Tujuan	: Meningkatkan peranan pemerintah dalam mengayomi kehidupan bermasyarakat
Sasaran	: Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
Lokasi	: Kota Batam
Dana	: Rp462.250.000,00 (<i>empat ratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah</i>)
Sumber Dana	: APBD

3. Pengawasan Tempat Hiburan Malam Selama Bulan Suci Ramadhan

Untuk menciptakan keamanan dan ketertiban umum selama bulan Ramadhan Satpol PP Kota Batam dalam pengawasan THM selama Bulan Suci Ramadhan menjalankan surat edaran Walikota Batam tentang Jam Buka dan Jam Tutup THM selama Bulan Suci Ramadhan didalam menjalankan tugas.

Satpol PP Kota Batam dan Tim Terpadu melakukan pengawasan Tempat

Hiburan Malam selama bulan Suci Ramadhan sesuai edaran Walikota, agar masyarakat khusuk melaksanakan ibadah. Dalam pelaksanaan selama Bulan Suci Ramadhan banyak tempat hiburan diberikan surat teguran SP 1 dan SP2. Kendala yang lain di lapangan adanya oknum-oknum yang mem-back up tempat hiburan tersebut sehingga mereka tetap buka dan tutup diluar jam yang telah ditentukan/

Indikator Kinerja	: Terlaksananya Pengawasan Tempat Hiburan Selama Bulan Suci Ramadhan
Tujuan	: Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dan aparat terhadap hukum
Sasaran	: Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dan aparat terhadap hukum
Lokasi	: Kota Batam
Dana	: Rp420.000.000,00 (<i>empat ratus dua puluh juta rupiah</i>)
Sumber Dana	: APBD

4. Kegiatan Operasi Yustisi Terhadap Peraturan Daerah

Kota Batam adalah Kota yang memiliki penduduk lebih kurang 1,3 Juta Jiwa serta memiliki latar belakang yang berbeda baik dari segi suku, umur, pendidikan serta agama dimana jumlah terus bertambah setiap tahunnya. Tentu saja hal tersebut sangat mempengaruhi terhadap kepatuhan masyarakat akan peraturan daerah yang berlaku di Kota Batam. Maka Tujuan dari kegiatan ini dimaksudkan agar meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hak dan kewajiban yang tertuang di dalam Produk Hukum Daerah sehingga tercipta estetika kota yang rapi, ketentraman dan ketertiban umum di Kota Batam.

Indikator Kinerja	: Terlaksananya Operasi Yustisi terhadap Peraturan Daerah
Tujuan	: Meningkatkan peranan pemerintah dalam mengayomi kehidupan bermasyarakat
Sasaran	: Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban

Lokasi	: Kota Batam
Dana	: Rp462.750.000,00 (<i>empat ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah</i>)
Sumber Dana	: APBD

5. Sosialisasi dan Penyuluhan Terhadap Peraturan Daerah yang Berlaku di Kota Batam.

Tujuan dari pelaksanaan Sosialisasi dan penyuluhan ini dimaksudkan sebagai upaya penurunan tingkat pelanggaran terhadap peraturan Daerah dan Produk Hukum lainnya seperti Perwako yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari Standar Operasional pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam. Diharapkan dengan adanya upaya pencegahan ini akan meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan Daerah demi lancarannya pembangunan Kota Batam .

Indikator Kinerja	: Terlaksananya Sosialisasi dan Penyuluhan terhadap Perda yang Berlaku di Kota Batam
Tujuan	: Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dan aparat terhadap hukum
Sasaran	: Meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam penerapan produk hukum
Lokasi	: Kota Batam
Dana	: Rp. 73.330.000,00 (<i>tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah</i>)
Sumber Dana	: APBD

6. Pembinaan Siskamling dan Peringatan Hut Satlinmas

Sebagai upaya untuk mengoptimalkan dan memasyarakatkan program sistem keamanan lingkungan (Siskamling) di kalangan masyarakat, sangat diperlukan pembinaan anggota Satlinmas yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan rakyat terlatih pada pengembangan daya tangkal bangsa dan

negara, khususnya lingkungan masyarakat dengan maksud agar fungsi ketertiban umum, perlindungan, dan ketentraman masyarakat dapat lebih terjamin pelaksanaannya. Oleh karena itu keberadaan anggota Linmas sangat penting dan dibutuhkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja telah mengamanatkan bahwa Perlindungan Masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota, maka peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) mempunyai posisi yang strategis dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. Oleh karena itu Satlinmas perlu terus diberdayakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjaga keamanan lingkungan, membantu dalam penanganan bencana, juga ikut serta dalam penanganan momen-momen yang bersifat lokal maupun nasional, seperti antara lain Pemilihan Umum anggota Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Menghadapi dinamika dan tantangan tugas yang begitu berat, Satlinmas dituntut untuk lebih profesional dalam melaksanakan tugas yang kompleks sehingga perlu adanya dukungan dari masyarakat. Dalam menjalankan tugas Satlinmas perlu diberikan pengetahuan tentang arti pentingnya tugas anggota Satlinmas yang sebenarnya.

Indikator Kinerja	:	Jumlah Linmas yang diberdayakan
Tujuan	:	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dan aparat terhadap hukum
Sasaran	:	Meningkatkannya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
Lokasi	:	Kota Batam
Dana	:	Rp280.000.000,00 (<i>dua ratus delapan puluh juta rupiah</i>)

7. Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Linmas

Satlinmas mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan lingkungan, tugas sebagai Satlinmas merupakan tugas yang berat dan mulia yang menuntut pengabdian yang tidak mengenal waktu serta pantang menyerah. Oleh karena itu sangat diperlukan penanganan pengelolaan linmas yang baik, terarah dan terkoordinir sehingga penyelenggaraan linmas dapat berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi linmas di masyarakat. Penyelenggaraan linmas dapat berjalan dengan baik dengan melibatkan aparat pemerintah yang memahami peraturan tentang penyelenggaraan linmas.

Indikator Kinerja	: Jumlah Linmas yang diberdayakan
Tujuan	: Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dan aparat terhadap hukum
Sasaran	: Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
Lokasi	: Kota Batam
Dana	: Rp376.468.000,00 (<i>tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah</i>)
Sumber Dana	: APBD

8. Kegiatan Pelatihan Sumber Daya Linmas dalam Penanggulangi Risiko Bencana

Untuk meningkatkan peran serta anggota Satlinmas sesuai tugas pokok, fungsi dan perannya sebagai perlindungan masyarakat, sangat diperlukan tenaga yang mempunyai keahlian dan ketrampilan yang memadai. Untuk mendapatkan tenaga satlinmas yang mempunyai keahlian dan keterampilan perlu pelatihan yang terarah. Pelatihan bagi anggota satlinmas perlu berkesinambungan sebagai usaha peningkatan sumber daya manusia anggota linmas.

Indikator Kinerja	: Jumlah Linmas yang diberdayakan
Tujuan	: Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dan aparat terhadap hukum
Sasaran	: Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban

Lokasi	:	Kota Batam
Dana	:	Rp. 127.840.000,00 (<i>seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah</i>)
Sumber Dana	:	APBD

9. Kegiatan Peningkatan Pengamanan Pemilu Legislatif Dan Presiden

Untuk meningkatkan peran serta anggota Satlinmas sesuai tugas pokok, fungsi dan perannya sebagai perlindungan masyarakat, sangat diperlukan tenaga yang mempunyai keahlian dan ketrampilan yang memadai. Untuk mendapatkan tenaga satlinmas yang mempunyai keahlian dan keterampilan perlu pelatihan yang terarah. Pelatihan bagi anggota satlinmas perlu berkesinambungan sebagai usaha peningkatan sumber daya manusia anggota linmas.

Indikator Kinerja	:	Jumlah TPS yang diamankan.
Tujuan	:	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
Sasaran	:	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dan aparat terhadap hukum
Lokasi	:	Kota Batam
Dana	:	Rp3.391.424.000.00 (<i>tiga milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah</i>)
Sumber Dana	:	APBD

BAB V

PENUTUP

Rencana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dilaksanakan tahunan yang merupakan titik awal pelaksanaan program dan kegiatan OPD berguna sebagai pedoman dalam mencapai capaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis OPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD 2016 -2021. Dokumen Renja memuat kebijakan, program, kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Tahun 2019 mengacu pada Renstra OPD dan hasil evaluasi program dan kegiatan OPD tahun sebelumnya, sehingga diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan yang berarti dalam menyusun program dan kegiatan prioritas di tahun yang akan datang.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencanapembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjangperencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangkamenengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah(kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan JangkaPanjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Renja-OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-OPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Batam, 13 Juli 2018
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam



NURZALIE, AP.,S.Sos
PEMBINA TK.I
NIP.19730206 199311 1 001